

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenada Group, 2014)
- Garmer, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, (Amerika: West Publishing Co, 2009),
- Gautama, Sidharta, *Kepastian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cahaya, 2006).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ismail, Nurhasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan (Pendekatan Ekonomi Politik), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Lamintang, P. A. F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007).
- McLeod, Ian. *Legal Theory*, (London: Palgrave Macmillan Ltd, 1999).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, (Jakarta: Pustaka Pena, 2010).
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980).

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Sunarso, Siswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015).

Sayfudin, Z. *Otonomi Daerah Vs Gurita Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2013),

Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *Pengesahan United Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 Pasal 37 ayat (2) dan (3).

_____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2).

_____. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Paparan Sosialisasi Pedoman Pemidanaan Pasal 2 & 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

C. Internet

Robertus Belarminus, Kasus E-KTP KPK Ajukan Banding Atas Putusan Irman dan Sugiharto,
(<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/21014281/-kasus-e-ktp-kpk-ajukanbandingatas-putusan-irman-dan-sugiharto>).

Haris Fadhil, Sidang Kasus e-KTP Irman-Sugiharto Didakwa Terima Rp 60 M,
(<https://news.detik.com/berita/d-3442174/sidang-kasus-e-ktp-irman-sugiharto-didakwaterima-rp-60-m>).

Abba Gabrillin, Meski "Justice Collaborator", Dua Terdakwa E-KTP Divonis Sama dengan Tuntutan,
(<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/15534341/meski-justice-collaborator-duaterdakwa-e-ktp-divonis-sama-dengan-tuntutan>).